

PERUBAHAN LUAS DAN ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN SERTA PERMASALAHANNYA DI PROVINSI JAMBI

N I. Minsyah, Endrizal, E.E. Ananto, dan F. Kasryno

Pembangunan pertanian yang telah, sedang, dan akan dilaksanakan pada masa-masa mendatang pada dasarnya memiliki dua tujuan pokok, yaitu untuk meningkatkan produksi baik secara kuantitatif maupun kualitatif serta meningkatkan pendapatan petani. Orientasi peningkatan produksi ditujukan untuk pemenuhan kebutuhan konsumsi dalam negeri terutama untuk beberapa tanaman bahan makanan utama yang memiliki posisi yang sangat strategis seperti beras, jagung, dan kedelai, dan untuk memenuhi kebutuhan ekspor terutama dua komoditas perkebunan yang secara tradisional merupakan primadona komoditas ekspor.

Dalam rencana strategisnya (2010–2014), Kementerian Pertanian telah menetapkan lima tujuan pembangunan pertanian. Pertama, mewujudkan sistem pertanian unggul berkelanjutan yang berbasis sumber daya lokal. Kedua, meningkatkan dan memantapkan swasembada berkelanjutan. Ketiga, menumbuhkembangkan ketahanan pangan dan gizi, termasuk diversifikasi pangan. Keempat, meningkatkan nilai tambah, daya saing, dan ekspor produk pertanian. Kelima, meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani. Kelima tujuan pembangunan tersebut harus terimplementasi dalam empat target utama, yaitu: (1) pencapaian swasembada dan swasembada berkelanjutan, (2) Peningkatan diversifikasi pangan, (3) peningkatan nilai tambah, daya saing, dan ekspor, dan (4) peningkatan kesejahteraan petani.

Salah satu permasalahan yang dihadapi bangsa ini dalam kaitannya dengan upaya mempertahankan swasembada beras dan jagung yang telah dicapai pada tahun 2007 dan 2008, serta mengupayakan tercapainya swasembada kedelai, jagung, dan daging sapi pada tahun 2014 adalah masih berlangsungnya alih fungsi lahan-lahan pertanian dari areal pertanian tanaman pangan utama ke berbagai penggunaan lain baik yang masih berada dalam lingkup sektor pertanian seperti menjadi areal pertanaman tanaman buah-buahan dan perkebunan yang secara ekonomi lebih menguntungkan maupun ke penggunaan pada sektor-sektor lain seperti menjadi areal perindustrian, fasilitas umum, dan pemukiman penduduk (Matondang *et al.* 1992).

Alih fungsi lahan tersebut tidak hanya terjadi di sentra-sentra produksi tanaman pangan terutama di Pulau Jawa, melainkan juga terjadi di luar Pulau Jawa, seperti di Provinsi

Jambi. Sebagai gambaran, total luas lahan pangan yang telah beralih fungsi menjadi areal perkebunan kelapa sawit mencapai 75.000 ha (Kompas 12 Agustus 2010). Pergeseran penggunaan lahan tersebut dipicu oleh membaiknya pasar dan harga kedua komoditas tersebut dibandingkan dengan komoditas pangan padi/jagung, di samping kemudahan memperoleh *cash income* secara periodik/mingguan.

Kegiatan usaha tani merupakan kegiatan ekonomi. Oleh karena itu, untuk memutuskan cabang usaha tani yang akan dikelola, petani sebaiknya memperhitungkan manfaat ekonomi yang akan diperolehnya, tidak lagi semata-mata hanya untuk memenuhi kebutuhan primernya (papan, pangan, dan pakaian), melainkan juga kebutuhan yang bersifat sekunder dan seterusnya. Secara naluriah dan didorong untuk memenuhi kebutuhan dan keinginannya, petani akan berupaya untuk dapat mengusahakan komoditas yang secara ekonomi lebih menguntungkan, yaitu jenis komoditas yang diminta pasar dengan harga yang relatif tinggi, sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya baik dalam bentuk penguasaan teknik budi daya, kesesuaian tanaman dengan lahan yang dimiliki, dan aspek finansial. Secara relatif, kemampuan yang dimiliki sangat terbatas, sehingga peluang tidak tercapainya yang diinginkan (terpenuhinya kebutuhan melalui peningkatan produksi dan pendapatan) cukup besar. Saat ini, usaha tani padi dirasakan petani kurang menguntungkan. Hal ini didukung oleh kenyataan bahwa untuk usaha tani padi sawah, dengan harga padi GKG Rp2.000/kg, akan diperoleh nilai produksi padi hanya Rp3.772.000 per ha atau pendapatan bersih Rp2.854.548 per ha per musim (6 bulan). Sedangkan untuk padi ladang lebih rendah lagi, dengan nilai produksi Rp1.771.200 per ha hanya akan menerima pendapatan bersih sebesar Rp1.167.000 per ha per tahun. Sementara untuk karet dengan produksi 100–150 kg/ha/2 minggu (karet unggul) atau 50–60 kg/ha/2minggu (karet lokal) akan diperoleh pendapatan Rp550.000–1.650.000/ha/2 minggu. Untuk kelapa sawit dengan produksi rata-rata 1 ton tandan segar per ha per 2 minggu dan harga Rp1.100/kg akan diperoleh pendapatan Rp1.100.000 per ha 2 minggu. Di samping itu, pasar untuk produk sawit masih terbuka.

Perkembangan Luas Areal dan Produksi

Tanaman Pangan dan Hortikultura

Dibandingkan luasan pada tahun 2000, luas areal pertanaman pangan di provinsi Jambi berkurang seluas 85.750 ha atau 29,74% dari 288.309 ha pada tahun 2000 menjadi 202.500 ha pada tahun 2008. Areal pertanaman yang paling luas berkurang adalah areal pertanaman padi sawah disusul areal pertanaman padi ladang, masing-masing seluas 73.634 ha atau 37,97% dan 11.585 ha atau 23,35%. Bila pada tahun 2000 luas areal pertanaman padi sawahnya 193.904 ha, pada tahun 2008 luasnya menjadi 120.270 ha. Areal pertanaman padi ladang juga mengalami penurunan, dari 40.827 ha pada tahun 2000 menjadi 38.242 ha pada tahun 2008. Bila digabungkan (padi sawah dan padi ladang),

penurunan luas areal pertanaman padi mencakup areal seluas 97.335 ha atau 29,57% dari 329.136 ha pada tahun 2000 menjadi 240.742 ha pada tahun 2008. Ternyata penurunan areal pertanaman padi ini yang dilansir harian Kompas pada tanggal 12 Agustus 2010, yang beralih fungsi menjadi areal perkebunan kelapa sawit. Harian tersebut melansir 75.000 ha areal persawahan (padi) telah beralih fungsi menjadi areal perkebunan kelapa sawit. Sisanya seluas 22.335 ha diduga sebagian telah beralih fungsi menjadi areal perkebunan karet dan lahan tidur.

Ditilik dari kurun waktu berkurangnya areal pertanaman padi sawah, konversi lahan terbesar terjadi dalam kurun waktu 2000–2002 (Tabel 1 dan Tabel 2). Pada Tabel 1, luas areal pertanaman padi sawah pada tahun 2000 mencapai 193.904 ha, sedangkan pada Tabel 2 luasnya berkurang menjadi 129.004 ha pada tahun 2002.

Tabel 1. Luas pertanaman tanaman pangan di Provinsi Jambi Tahun 2000 dan 2008

Tanaman	Tahun 2000	Tahun 2008	Perubahan	
			ha	%
1. Padi sawah	193.904	120.270	- 73.634	- 37,97
2. Padi ladang	49.827	38.242	- 11.585	-23,25
3. Palawija	27.940	25.180	-2.760	- 9,88
4. Sayuran dan buahan	16.638	18.867	2.229	13,40
Jumlah	288.309	202.559	- 85.750	- 29,74

Sumber: Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jambi (2005; 2009) dan diolah (2010)

Areal pertanaman palawija dan sayur-sayuran serta buah-buahan mengalami perubahan yang berlawanan. Areal pertanaman palawija berkurang seluas 2.760 ha atau 9,88% dari 27.940 ha pada tahun 2000 menjadi 25.180 ha pada tahun 2008. Berkurangnya areal pertanaman palawija ini diduga juga karena dialihfungsikan menjadi areal perkebunan terutama perkebunan kelapa sawit. Sedangkan areal pertanaman sayur-sayuran dan buah-buahan bertambah seluas 2.229 ha atau 13,40% dari 16.638 ha pada tahun 2000 menjadi 18.876 ha pada tahun 2008

Disinyalir areal pertanaman sayuran dan buah-buahan bertambah. Walaupun belum ada data yang pasti dan valid, karena terjadinya perambahan lahan-lahan yang masuk dalam kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS), secara kasat mata dapat terlihat dengan jelas penanaman sayur-sayuran di lereng-lereng gunung Kerinci dan bukit-bukit yang memiliki kecuraman lebih besar dari 15 derajat. Menurut Sugandha dan Unang (2001), lahan-lahan yang memiliki kecuraman lebih dari 15 derajat tidak direkomendasikan untuk dijadikan sebagai areal budi daya. Kalaupun akan dijadikan sebagai kawasan untuk budi daya tanaman, harus diterapkan kaidah-kaidah konservasi lahan, di antaranya pembentukan terasering/sengkedan yang bertujuan untuk memperkecil/menghambat laju terjadinya longsor dan erosi yang dapat mempercepat kehilangan tanah-tanah humus yang kaya bahan organik dan unsur-unsur hara dalam tanah.

Tabel 2. Luas pertanaman padi sawah dan padi ladang per kabupaten dalam provinsi Jambi, tahun 2002 dan 2008

Kabupaten/Kota	Tahun 2002		Tahun 2008		Perubahan	
	ha	% ^{a)}	ha	% ^{a)}	ha	%
A. PADI SAWAH						
1. Kerinci	37.354	28,96	28.911	24,22	-8.443	-22,60
2. Merangin	9.332	7,23	9.800	8,21	468	5,02
3. Sarolangun	3.967	3,08	3.627	3,04	-340	-8,57
4. Batanghari	10.375	8,04	7.733	6,48	-2.642	-25,47
5. Muaro Jambi	6.380	4,95	7.831	6,56	1.451	22,74
6. Tj. JabungTimur	33.839	26,23	33.409	27,99	-430	-1,27
7. Tj. Jabung Barat	13.370	10,36	17.322	14,51	3.952	29,56
8. Tebo	5.310	4,12	4.365	3,66	-945	-17,8
9. Bungo	7.970	6,18	5.288	4,43	-2.682	-33,65
10. Kota Jamb	1.107	0,86	1.062	0,89	-45	-4,01
Jumlah (provinsi)	129.004	100,00	119.486	100,00	-9.656	-7,45
B. PADI LADANG						
1. Kerinci	72	0,27	94	0,40	22	30,56
2. Merangin	8.776	32,83	8.612	36,57	-164	-1,87
3. Sarolangun	8.978	33,59	4.689	19,91	-4.289	-47,77
4. Batanghari	348	1,30	668	2,84	320	91,95
5. Muaro Jambi	382	1,43	678	2,88	296	77,49
6. Tj. JabungTimur	117	0,44	36	0,15	-81	-69,23
7. Tj. Jabung Barat	279	1,04	1.551	6,59	1.272	455,91
8. Tebo	4.084	15,28	4.195	17,81	111	2,72
9. Bungo	3.678	13,76	3.019	12,82	-659	-17,92
10. Kota Jambi	15	0,06	6	0,03	-9	-60
Jumlah (provinsi)	26.729	100,00	23.548	100,00	-3.181	100,00

Sumber Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jambi (2005; 2009) dan diolah (2010)

Keterangan: a) terhadap total tingkat provinsi.

Luas areal pertanaman adalah jumlah areal yang ditanam pada tahun bersangkutan ditambah dengan sisa tanaman yang belum dipanen pada tahun sebelumnya.

Penurunan luas areal pertanaman terbesar terjadi di kabupaten Kerinci seluas 8.443 ha, berturut-turut disusul kabupaten Bungo seluas 2.682 ha dan kabupaten Batanghari seluas 2.642 ha. Penurunan luas areal pertanaman padi sawah di Kabupaten Kerinci dalam skala yang cukup luas ini sangat memprihatinkan, karena jenis lahan di Kabupaten Kerinci ini adalah yang terbaik dibandingkan dengan tingkat kesuburan lahan di kabupaten-kabupaten/kota lain yang ada di Provinsi Jambi. Selama ini, Kabupaten Kerinci memberikan kontribusi terbesar terhadap total produksi padi Provinsi Jambi.

Karena adanya program perعتakan sawah, di antara 10 kabupaten/kota, ada tiga kabupaten yang areal pertanaman padi sawahnya mengalami peningkatan. Ketiga kabupaten tersebut yaitu Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Merangin dengan penambahan luasnya masing-masing 3.952 ha atau 29,56%; 1.451 ha atau 22,74%; dan 468 ha atau 5,02%.

Pada areal pertanaman padi ladang, penurunan areal tanam terbesar terjadi di Kabupaten Sarolangun seluas 4.289 ha atau 47,77%. Kabupaten-kabupaten lain yang juga mengalami penurunan luas areal pertanaman padi dengan luas antara 9 ha–659 ha adalah Kabupaten Merangin, Tanjung Jabung Timur, Bungo, dan Kota Jambi. Sebaliknya, areal tanam padi ladang di lima kabupaten lainnya mengalami peningkatan. Peningkatan terbesar terjadi di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, yaitu 1.127 ha atau 455,91% dari 279 ha menjadi 1.127 ha.

Walaupun areal panen padi mengalami penyusutan, dilihat dari total produksi justru mengalami peningkatan. Hal ini disebabkan karena adanya peningkatan produktivitas yang cukup tinggi, yaitu 0,93 ton/ha atau 27,51% untuk padi sawah dan 0,63 ton/ha atau 28,51% untuk padi ladang (Tabel 3). Peningkatan produktivitas juga terjadi pada tanaman palawija, sayur-sayuran, dan buah-buahan. Menurut Disperta Provinsi Jambi (2009b), terjadinya peningkatan produktivitas ini antara lain disebabkan oleh peningkatan penggunaan varietas unggul dan benih bermutu.

Tabel 3. Luas panen dan produktivitas tanaman pangan di Provinsi Jambi tahun 2000 dan 2008.

Tanaman	Tahun 2000		Tahun 2008		Perubahan			
	Luas panen (ha)	Produktivitas (ton/ha)	Luas panen (ha)	Produktivitas (ton/ha)	Luas panen		Produktivitas	
					ha	%	ton/ha	%
1. Padi Sawah	135.187	3,38	119.486	4,31	15.701	-11,6	0,93	27,51
2. Padi ladang	36.208	2,21	23.548	2,84	12.660	-35,0	0,63	28,51
3. Palawija	26.881	3,77	21.717	4,71	-5.164	-19,2	0,94	24,93
4. Sayuran dan buahan	11.281	6,27	18.604	9,05	7.323	64,9	2,78	44,34
Jumlah	209.557	-	183.355	-	26.202	-12,5	-	-

Sumber: Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jambi (2005; 2009) dan diolah (2010)

Peningkatan produktivitas padi, tidak hanya mampu mengompensasi penurunan luas panen, melainkan juga dapat mempertahankan posisi Provinsi Jambi “tetap pada posisi” surplus beras, sekalipun tingkat surplus tersebut semakin rendah (Tabel 4).

Tabel 4. Ketersediaan dan kebutuhan konsumsi beras Provinsi Jambi pada tahun 2000 dan 2008

Tahun	Produksi (ton)	Kebutuhan konsumsi (ton)	Neraca (+/-)
2000	339.344	315.156 ^{a)}	24.188
2008	340.779	329.552 ^{b)}	11.227
Perubahan	1.535	14.396	-12.327

Sumber: Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jambi (2005; 2009 (diolah))

Keterangan:

a) Konsumsi 131,63 kg/kapita/tahun

b) Konsumsi 126,23 kg/Kpaita/tahun

Walaupun demikian, berdasarkan data tabel tersebut, bila penurunan luas areal pertanaman dan panen padi tersebut terus berlangsung bahkan tidak terkendali, pada saatnya nanti posisi Provinsi Jambi sebagai provinsi yang surplus beras akan berganti menjadi daerah yang “minus beras”.

Tanaman Perkebunan

Bila pada pertanaman pangan (padi, palawija, sayur-sayuran, dan buah-buahan), dalam kurun waktu selama delapan tahun dari tahun 2000–2008 luas arealnya mengalami penyusutan dalam skala yang cukup besar yaitu 85.750 ha atau senilai 29,74%. Pada tanaman perkebunan utama (berdasarkan urutan pertama sampai ke lima luas areal) justru mengalami peningkatan sangat signifikan, walaupun tiga di antaranya mengalami penyusutan (Tabel 5).

Tabel 5. Luas areal perkebunan utama Provinsi Jambi, tahun 2000 dan 2008

Tanaman	Tahun 2000	Tahun 2008	Perubahan	
			ha	%
1. Karet	558.570	644.943	86.373	15,46
2. Kelapa Sawit	296.010	484.137	188.127	63,55
3. kelapa Dalam	128.079	119.231	-8.848	-6,91
4. Kasiavera	60.776	47.327	-13.449	-22,13
5. Kopi	28.755	24.365	-4.390	-15,27
Jumlah	1.072.190	1.320.003	247.813	23,11

Sumber: Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jambi (2005; 2009 dan 2010 (diolah))

Peningkatan areal pertanaman perkebunan terluas terjadi pada perkebunan kelapa sawit, yaitu seluas 188.127 ha atau 63,55% dari 296.010 ha menjadi 484.137 ha. Bila dirata-ratakan selama kurun waktu di atas, peningkatan luas arealnya rata-rata 23.515 ha per tahun. Dengan asumsi peningkatan areal dalam jangka pendek adalah tetap, dalam waktu kurang dari 6 tahun ke depan (dari tahun 2008), areal perkebunan kelapa sawit ini akan menggeser posisi areal perkebunan karet yang selama ini menduduki posisi sebagai areal perkebunan terluas.

Ditilik berdasarkan kepenguasaannya, perkebunan karet dan kelapa sawit terdiri atas Perusahaan Perkebunan Besar Negara (PBN), Perusahaan Perkebunan Besar Swasta, dan Perkebunan Rakyat. Hampir seluruh (99,61%) perkebunan karet yang ada di Provinsi Jambi merupakan perkebunan rakyat dengan produktivitas yang sangat rendah yaitu hanya 0,80 ton/ha (Disbun Provinsi Jambi 2009). Hasil (produktivitas) ini sudah sedikit lebih baik dibandingkan produktivitas hasil Survei Bank Indonesia tahun 2006, yaitu 0,74 ton/ha. Lebih lanjut dikemukakan, hal-hal yang menyebabkan rendahnya produktivitas karet rakyat ini di antaranya adalah pola pengusahaan tanaman yang dilakukan tanpa kultur teknis yang memadai, seperti tidak melakukan pemupukan, tidak melakukan penyiangan gulma, serta pemberantasan hama dan penyakit. Selain itu, rendahnya produktivitas karet rakyat di Provinsi Jambi juga disebabkan sebagian besar tanaman karet rakyat telah berumur tua (di atas 25 tahun), bibit yang digunakan sebagian besar merupakan bibit asalan bukan dari klon/varietas unggul (Adri *et al.* 2009).

Hal yang berbeda terlihat pada tanaman kelapa sawit. Luas areal yang dimiliki perkebunan besar swasta mencapai 149.037 ha atau 30,78%, yang dimiliki oleh rakyat seluas 316.480 ha atau 65,37%, selebihnya milik perkebunan besar negara. Produktivitas kelapa sawit (CPO) PBN, PBS, dan rakyat tidak terlalu jauh berbeda, yaitu 3,85 ton/ha pada PBN; 3,40 ton/ha pada PBS; dan 3,21 ton/ha pada perkebunan rakyat. Perbedaan produktivitas yang relatif kecil ini diduga karena data yang digunakan untuk mengukur produktivitas perkebunan rakyat berasal dari kebun plasma dan belum memasukkan produktivitas kebun sawit rakyat yang pengusahaannya dilakukan secara swadaya. Hal ini terlihat dari hasil kegiatan survei yang dilakukan oleh Balai Pengkajian Teknologi Pertanian. Dari kegiatan survei tersebut, diperoleh data yang menggambarkan perbedaan yang sangat signifikan antara produktivitas perkebunan rakyat yang dibiaya secara swadaya dengan produktivitas kebun plasma dan inti (PBS). Dari kebun rakyat swadaya, hasil yang diperoleh rata-rata 0,82 ton TBS/ha/bln, dari kebun plasma rata-rata 1,38 ton TBS/ha/bln, dan dari kebun inti PBS rata-rata 1,72 ton TBS/ha/bln (Minsyah 2009). Lebih lanjut dikemukakan rendahnya produktivitas perkebunan sawit rakyat secara swadaya ini disebabkan oleh beberapa hal, di antaranya: 1) benih yang digunakan tidak diketahui asal-usulnya (diduga bibit palsu); 2) jenis dan dosis serta frekuensi pemupukan yang rendah; dan 3) kurang perawatan.

Penggunaan bibit palsu mengakibatkan produksi yang diperoleh tidak lebih dari 50% dibandingkan dengan menggunakan bibit bermutu (Ariwibowo *dalam* Kompas 2005). Bila diasumsikan produksi normal adalah produksi yang diperoleh dari rata-rata kebun kelapa sawit plasma yaitu 15,84 ton TBS/ha/th (Minsyah 2009), produksi (TBS) yang dihasilkan dari bibit palsu sebesar 7,92 ton TBS/ha/th. Produksi yang diperoleh dari kebun plasma tersebut adalah produksi dengan perlakuan pupuk lengkap sesuai dengan rekomendasi, karena selama belum terlaksananya konversi, petani plasma masih mendapat "bantuan" dari KUD sebagai perpanjangan tangan dari perkebunan inti (PBS dan PBN).

Agar berproduksi optimal, di samping menggunakan benih atau bibit yang bermutu, tanaman kelapa sawit memerlukan perawatan yang intensif yaitu pemupukan dua kali setahun, pemangkasan, dan pembersihan areal. Untuk satu kali pemupukan diperlukan Urea sebanyak 150 kg/ha, Sp 36 150 kg/ha, dan KCL 100 kg/ha. Di samping ketiga jenis pupuk di atas, dalam 1 (satu) tahun tanaman kelapa sawit perlu dikapur dengan dosis 200 kg. Dengan demikian, dalam satu tahun dosis pupuk dan kapur pertanian yang diperlukan sebanyak 1.000 kg. Bila tidak dilakukan atau dilakukan tetapi terlambat, produksi pada tahun berikutnya akan berkurang sebanyak 50% dari tahun sebelumnya. Sebagai ilustrasi, bila pada tahun kedua dari umur produksi normal adalah 12 ton TBS/ha/th, produksi tahun ketiga diperkirakan tidak akan lebih dari 6 ton TBS/ha/th, demikian seterusnya. Di samping produksi lebih rendah, umur ekonomis tanaman pun akan menjadi lebih pendek (≤ 20 tahun).

Tabel 6. Penggolongan tanaman perkebunan utama berdasarkan penguasaannya pada tahun 2008

Tanaman	Perkebunan Besar Negara			Perkebunan Besar Swasta			Perkebunan Rakyat		
	ha	ton/ha	%	ha	ton/ha	%	ha	ton/ha	%
1. Karet	-	-	-	2.526	1,08	0,39	642.417	0,80	99,61
2. K. sawit	18.620	4.060	3,85	149.037	3,40	3,02	316.480	3,21	65,37
3. K. Dalam	-	-	-	-	-	-	119.030	1,27	100
4. Kasiavera	-	--	-	-	-	-	47.237	2,21	100
5. Kopi	-	--	-	-	-	--	24.365	0,64	100

Sumber: Dinas Perkebunan Provinsi Jambi (2009 dan 2010 (diolah))

Tabel 7. Luas tanaman perkebunan utama Provinsi Jambi berdasarkan kabupaten pada tahun 2008

Kabupaten/Kota	Karet	K. sawit	K. dalam	Kasiavera
1. Batanghari	111.361	65.483	843	-
2. Muaro Jambi	63.212	127.614	928	-
3. Bungo	96.271	49.602	678	236
4. Tebo	110.880	40.486	1.024	-
5. Merangin	122.063	50.634	2.017	4.979
6. Sarolangun	116.886	39.460	566	-
7. TJ. Barat	16.215	84.598	53.484	-
8. TJ. Timur	6.895	26.197	59.370	-
9. Kerinci	1.160	63	120	41.612
10. Kota Jambi	-	-	-	-

Sumber: Dinas Perkebunan Provinsi Jambi (2009 dan 2010 (diolah))

Alih Fungsi Lahan Pangan dan Faktor Penyebabnya

Penurunan luas areal pertanaman dan panen padi dan palawija di Provinsi Jambi, paling tidak disebabkan 2 (dua) faktor utama, yaitu 1) beralihnya fungsi lahan menjadi areal perkebunan terutama kelapa sawit dan karet, dan; 2) lahan tidak diusahakan untuk sementara waktu sehingga menjadi lahan tidur. Dari kedua faktor tersebut, faktor utama yaitu peralihan fungsi lahan menjadi areal perkebunan kelapa sawit dan karet, di perkirakan menjadi faktor dominan, di samping dalam luasan yang relatif kecil beralih menjadi areal industri (umumnya pabrik pengolahan hasil pertanian seperti pabrik CPO dan karet), perkantoran, dan pemukiman.

Dialihfungsikan lahan pangan menjadi areal perkebunan kelapa sawit atau untuk sementara waktu tidak diusahakan oleh petani sehingga menjadi lahan tidur, secara mendasar disebabkan oleh hasil tanaman pangan yang diperoleh relatif kecil tidak sebanding dengan biaya, waktu, dan tenaga kerja yang dicurahkan bahkan kadang-kadang mengalami kegagalan panen. Selain itu, sebagian besar petani berpendapat bahwa hasil dari tanaman pangan tidak akan dapat memenuhi kebutuhan dan keinginannya yang tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan dasar (papan, pangan, dan pakaian) melainkan juga kebutuhan-kebutuhan yang bersifat sekunder bahkan untuk dapat membiayai anak-anaknya melanjutkan jenjang pendidikan yang lebih tinggi minimal setingkat SLTA agar kelak anaknya tidak bernasib seperti orang tuanya.

Sebagai contoh (kasus), produksi padi yang diperoleh petani di kecamatan Muara Sabak dan Rantau Rasau Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada tahun 1998, petani di dua kecamatan tersebut hanya memperoleh padi antara 1 ton GKP/ha–2 ton GKP/ha, bahkan sebagian di antaranya hanya mendapatkan tidak lebih dari 0,5 ton GKG/ha. Di samping produksi yang rendah, lahan-lahan mereka hanya di tanam satu kali dalam setahun (Alihamsyah *et al.* 2000).

Kejadian yang hampir serupa, walaupun penyebabnya berbeda, juga terjadi di bekas lokasi transmigrasi Pamenang A Kabupaten Merangin dan Petaling Jaya Kabupaten Muaro Jambi, serta di beberapa desa di Kecamatan Pelepat (sebelum pemekaran kecamatan) Kabupaten Bungo. Di kecamatan Muara Sabak dan Rantau Rasau Kabupaten Tanjung Jabung Timur, biang penyebab rendahnya produksi padi karena terjadinya oksidasi lapisan pirit akibat penggalian/perbaikan/pendalaman saluran drainase yang tidak/kurang memperhitungkan kedalaman lapisan pirit.

Sitanggang *et al.* (2005) menemukan bahwa di kedua kecamatan tersebut, dari 99,20 ha lahan pangan milik 80 responden (petani), seluas 33,95 ha atau 34,22% di antaranya paling tidak telah direncanakan untuk dialihfungsikan menjadi kebun kelapa sawit (Tabel 8). Hal tersebut di dukung oleh data yang diterbitkan oleh Dinas Perkebunan Provinsi Jambi (2004 dan 2006) bahwa hanya dalam kurun waktu selama dua tahun (2003–2005) luas areal perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Tanjung Jabung Timur telah bertambah

seluas 3.813 ha atau 57,34% dari 6.650 ha pada tahun 2002 menjadi 10.403 ha pada tahun 2005 (Disbun Provins Jambi 2006). Luas areal tersebut belum termasuk kebun kelapa sawit yang ditanam oleh petani secara mandiri (swadaya murni). Salah seorang staf Dinas Kehutanan dan Perkebunan setempat (kabupaten Tanjung Jabung Timur) *dalam* Sitanggang *et al.* (2005) menyatakan bahwa luas kebun kelapa sawit yang ditanam petani secara swadaya di Kabupaten Tanjung Jabung Timur sampai pada tahun 2004 tidak kurang dari 4.000 ha.

Tabel 8. Jumlah responden berdasarkan luas lahan pangannya yang telah dan akan ditanam kelapa sawit di Kecamatan Rantau Rasau dan Muara Sabak, Tanjung Jabung Timur, 2004

Status Responden	Responden		Luas lahan	
	Jumlah	Persen (%)	ha	Persen *) (%)
1. Telah menanam	22	27,50	13,80	13,91
2. Baru meyiapkan bibit	24	30,00	7,80	7,86
3. Baru punya rencana	25	31,25	12,35	12,45
4. Sementara belum punya rencana	09	11,25	0,00	0,00

Sumber: Minsyah NI (2009)

Ket: *) dari 99,20 ha total luas lahan pangan responden

Di lokasi transmigrasi Pamenang A Kabupaten Merangin dan Petaling jaya Kabupaten Muaro Jambi, rendahnya produksi tanaman pangan (utamanya padi) disebabkan oleh ketidakterediaan air yang dibutuhkan karena ketersediaan air sangat tergantung ada tidaknya hujan. Sedangkan di Kecamatan Pelepat Kabupaten Bungo, walaupun memiliki saluran irigasi, hanya sebagian kecil dari areal persawahan di kecamatan tersebut yang terairi, itu pun hanya dapat berlangsung pada musim hujan. Selain masalah ketidakterediaan air, rendahnya produksi tanaman pangan di lokasi-lokasi yang disebutkan di atas juga disebabkan tingginya intensitas serangan hama (utamanya tikus dan babi) dan penyakit. Walaupun tidak diperoleh angka pasti, namun dari wawancara dengan beberapa petani dan pemuka masyarakat di masing-masing lokasi, yang informasinya patut/layak diyakini kebenarannya (mendekati), mengemukakan bahwa lebih dari 50% lahan petani transmigran yang awalnya diperuntukkan sebagai lahan pangan telah ditanami kelapa sawit, baik oleh perkebunan besar swasta (PBS), di mana petani pemilik lahan menjadi plasma maupun yang ditanam dan dikelola sendiri oleh petani secara swadaya.

Rendahnya hasil/produksi tanaman pangan (utamanya padi) merupakan refleksi terjadinya penurunan kualitas lahan dan merupakan salah satu alasan terpenting yang menyebabkan perubahab fungsi lahan menjadi kebun kelapa sawit oleh petani di 4 (empat) desa di Kecamatan Rantau Rasau dan di 3 (tiga) desa di Kecamatan Muara Sabak. Kelima alasan lainnya adalah (1) perawatan kelapa sawit lebih ringan dibandingkan dengan tanaman pangan; (2) untuk meningkatkan taraf hidup (kesejahteraan) keluarganya; (3) lahan pangan petani lain dan tetangga sekitar telah dan akan dijadikan kebun kelapa sawit;

(4) hasil dan pendapatan lebih pasti, dan (5) sebagai sumber pendapatan (tabungan) di hari tua. Secara rinci alasan, persepsi, dan motivasi petani responden dapat dilihat pada Tabel 9.

Alasan untuk meningkatkan taraf hidup (kesejahteraan) keluarganya serta pendapatan kelapa sawit lebih pasti, merupakan dua alasan yang menduduki peringkat kedua yang dikemukakan oleh 72% atau 90% responden. Hal ini didasarkan atas penglihatan sendiri maupun mendengar cerita atau informasi dari petani lain bahwa kehidupan petani kelapa sawit seperti di Sungai Bahar dan Petaling Jaya (Kabupaten Muaro Jambi) dan di tempat lain lebih makmur. Hal yang dijadikan indikator kemakmuran antara lain: (1) ukuran dan kualitas rumah serta perabotannya lebih baik; (2) kepemilikan alat transportasi, di mana setiap rumah minimal memiliki satu buah sepeda motor; dan (3) mampu membiaya pendidikan anak-anaknya ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi (SLTA) bahkan sampai ke perguruan tinggi.

Tabel 9. Jumlah dan persentase responden berdasarkan alasan, persepsi, dan motivasi petani yang telah dan akan menjadikan seluruh atau sebagian lahan pangannya menjadi kebun kelapa sawit, 2004

Alasan/Persepsi/Motivasi	Jumlah	Persen (%)
1. Produksi padi dan tanaman pangan lainnya rendah tidak sebanding dengan korbanan (<i>input</i> dan tenaga kerja) yang dicurahkan	80	100,00
2. Bila dibandingkan dengan tanaman pangan perawatan kelapa sawit lebih ringan	62	77,50
3. Untuk meningkatkan taraf hidup keluarga	72	90,00
4. Petani lain/tetangga telah dan akan mengalihkan lahan pangannya menjadi kebun kelapa sawit	70	87,50
5. Hasil dan pendapatan lebih pasti	72	90,00
6. Sebagai sumber penghasilan (tabungan) di hari tua	60	70,00

Sumber: Minsyah NI (2009)

Keterangan: Setiap responden memberikan 2–4 alasan

Pengalaman responden selama ini juga sangat memengaruhi. Selain hanya untuk konsumsi keluarga, pendapatan dari tanaman pangan tidak dapat mencukupi kebutuhan hidup keluarganya, termasuk kebutuhan dasar (primer), walaupun produksinya sudah “cukup” tinggi. Hal ini disebabkan harga yang diterima petani rendah. Sebagai contoh, pada tahun 2003 harga GKG yang ditawarkan pedagang atau yang diterima petani di tempat hanya berkisar antara Rp800–Rp 1.000/kg, sedangkan dalam bentuk beras hanya berkisar Rp1.500–Rp1.800/kg tergantung kualitas. Dengan demikian, untuk satu hektare

dari satu kali tanam dengan waktu lebih kurang 5 bulan terhitung sejak persiapan hingga panen, penerimaan (pendapatan kotor) yang diterima petani hanya berkisar Rp576.000–Rp1.320.000. Bandingkan dengan pendapatan petani plasma kelapa sawit, setelah dipotong angsuran (30%–35%) dan biaya lain-lain, dari 1 (satu) kavling atau 2 ha, petani memperoleh pendapatan berkisar Rp600.000–Rp800.000 per bulan (Amri *et al.* 2004). Selain itu, risiko tidak menghasilkan (panen) dari tanaman pangan tinggi, sedangkan dari tanaman kelapa sawit risiko tidak mendapatkan hasil adalah sangat kecil. Risiko terbesar adalah terjadinya penundaan masa penimbangan terutama pada musim hujan, penundaan masa penimbangan ini adalah identik dengan penundaan pendapatan yang akan mereka terima.

Alasan lain petani lain/tetangga telah dan akan menjadikan lahan pangannya menjadi kebun kelapa sawit adalah kekhawatiran bila petani lain atau tetangganya telah dan nantinya akan menjadikan lahan pangannya menjadi kebun kelapa sawit, tanaman pangan yang diusahakannya akan menjadi pusat serangan hama dan penyakit. Apalagi tanaman kelapa sawit petani lain atau tetangga tersebut baik sebelum maupun setelah menghasilkan tidak dirawat dengan baik akan menjadi tempat yang sangat disenangi oleh beberapa jenis OPT.

Di tingkat lapangan, petugas pertanian (utamanya PPL) sebetulnya juga sangat menyayangkan terjadinya alih fungsi lahan tersebut karena akan sangat berpengaruh terhadap total produksi padi dan lebih spesifik dapat menyebabkan kurang tersedianya pangan yang dapat menjadi muara terjadinya kerawanan pangan di wilayah kerjanya. Menghadapi hal tersebut, petugas pertanian lapangan tersebut tidak bisa berbuat banyak. Pelarangan tidak dapat mereka lakukan karena akan bertentangan dengan Undang-Undang No. 12 tentang Budi Daya Tanaman, di mana di dalamnya juga memuat kebebasan penuh bagi petani untuk memilih dan menentukan jenis tanaman yang akan diusahakan. Pada akhirnya mereka mengambil sikap netral, tidak menganjurkan dan tidak melarang.

Agar alih fungsi lahan pangan tidak berlangsung secara tidak terkendali, dalam penetapan suatu kawasan menjadi areal pertanaman pangan sangat diperlukan sistem penyediaan air yang dapat menyediakan kebutuhan air selama proses pertumbuhan dan perkembangan tanaman pangan di masa mendatang, khususnya padi. Hal ini dapat di buktikan (dilihat) di dua lokasi areal pertanaman pangan, yaitu di Kecamatan Tungkal Ulu tepatnya di bekas lokasi transmigrasi Suban kabupaten Tanjung Jabung Barat dan di Kecamatan Jujuhan Ilir Kabupaten Bungo.

Di bekas lokasi transmigrasi Suban, sebelum adanya perbaikan/renovasi saluran irigasi teknis (2001), karena ketidaktersediaan air yang cukup sepanjang tahun, petani di daerah tersebut hanya menanam padi satu kali dalam setahun dengan hasil yang relatif rendah, sebagian dari petani di lokasi tersebut telah dan akan mengalihkan sebagian lahan pangannya menjadi areal perkebunan kelapa sawit. Namun, setelah adanya perbaikan

saluran irigasi (2006), bagi petani-petani yang belum terlanjur menanam kelapa sawit, tidak akan mengalihkannya menjadi areal perkebunan, karena dengan adanya perbaikan saluran irigasi, mereka sangat puas dengan hasil yang diperoleh, di mana dalam satu tahun, mereka minimal dapat menanam padi 2 kali dan palawija (utamanya kedelai) satu kali setahun, dengan produksi di atas 4 ton GKG/ha untuk padi dan 1,1–1,3 ton biji kering kedelai/ha (wawancara informal 2010).

Hal yang hampir serupa terjadi di Kecamatan Jujuhan Ilir, Kabupaten Bungo, tepatnya di Desa Sari Mulyo. Di desa tersebut, sebelum dibangun irigasi Batanghari, sebagian lahan pangan petani (transmigran) telah di tanam dengan tanaman perkebunan terutama karet dan kelapa sawit. Setelah saluran irigasi Batanghari selesai dibangun, dengan melihat produksi padi sawah yang tinggi dan dapat ditanam padi minimal 2 kali dalam setahun, sebagian dari petani yang lahan pangannya telah di tanam dengan tanaman perkebunan berkeinginan untuk mengalihkannya sebagai areal persawahan (wawancara informal 2010).

Hal lain yang juga perlu di lakukan adalah: (1) membuat kebijakan yang dapat menjamin tingkat harga yang layak, yang seharusnya di terima petani atas tanaman pangan yang dihasilkannya; 2). Merevisi/mengamandemen UU No. 12 tentang Budi Daya Tanaman yang di dalamnya memuat aturan-aturan yang memungkinkan aparat pertanian khususnya yang berada di lapangan mempunyai pijakan hukum untuk menghimbau atau lebih keras lagi dapat melarang petani-petani yang berada di dalam wilayah kerjanya mengalih fungsikan lahan pangannya yang sangat potensial menjadi areal perkebunan.

Penutup

Dibandingkan pada tahun 2000, luas areal pertanaman pangan di Provinsi Jambi tahun 2008 mengalami penyusutan dalam skala luasan yang relatif besar yaitu 85.750 ha atau 29,74% dari 288.309 ha menjadi 202.500 ha. Penyusutan terbesar di alami areal pertanaman padi sawah, disusul areal pertanaman padi ladang. Penyusutan luas areal ini disebabkan oleh dua hal utama, yaitu: (i). Beralih fungsi menjadi areal pertanaman perkebunan terutama perkebunan kelapa sawit dan; (ii). Untuk sementara waktu tidak diusahakan sehingga menjadi lahan tidur. Walaupun areal pertanaman dan panennya mengalami penyusutan, produksi padi yang dihasilkan justru lebih tinggi, disebabkan adanya kenaikan produktivitas yang signifikan.

Apabila areal pertanaman pangan mengalami penyusutan dalam skala yang relatif luas, areal pertanaman perkebunan pada dua titik tahun (2000 dan 2008) justru mengalami peningkatan luas yang sangat berarti yaitu 247.813 ha atau 23,11% dari 1.072.190 ha pada tahun 2000 menjadi 1.320.003 ha pada tahun 2008. Areal perkebunan yang mengalami peningkatan terbesar terjadi pada perkebunan kelapa sawit seluas 188.127 ha atau 63,55% dari 296.010 ha menjadi 484.137 ha. Bila dirata-ratakan selama kurun waktu di atas, peningkatan luas arealnya rata-rata 23.515 ha per tahun.

Produksi tanaman pangan yang rendah tidak sebanding dengan yang dikorbankan. Hal ini merupakan faktor utama dialihkannya seluruh atau sebagian lahan pangan menjadi areal perkebunan kelapa sawit oleh petani. Hal ini paling tidak terjadi di Kecamatan Muara Sabak dan Rantau Rasau Kabupaten Tanjung Jabung Timur, bekas lokasi transmigrasi Pamenang A Kabupaten Merangin, bekas lokasi transmigrasi Petaling Jaya, Kabupaten Muaro Jambi, dan beberapa desa di Kecamatan Palepat (sebelum pemekaran kecamatan).

Faktor penyebab rendahnya produksi tanaman pangan di lokasi-lokasi di atas berbeda. Di Kecamatan Muara Sabak dan Rantau Rasau, faktor penyebabnya karena oksidasi lapisan pirit, dan di lokasi-lokasi lain disebabkan oleh ketidaktersediaan air yang dibutuhkan untuk mengelola lahan pangannya menjadi lebih optimal.

Agar alih fungsi lahan pangan tidak berlangsung secara tidak terkendali, harus dilakukan: (i) kebijakan untuk penetapan suatu kawasan menjadi areal pertanaman pangan, disertai infrastruktur sistem penyediaan air yang memadai, khususnya untuk padi; (ii) membuat kebijakan yang dapat menjamin tingkat harga yang layak, yang seharusnya di terima petani atas tanaman pangan yang dihasilkan; (iii) merevisi/mengamandemen UU No. 12 tentang Budi Daya Tanaman yang di dalamnya memuat aturan-aturan yang memungkinkan aparat pertanian khususnya yang berada di lapangan mempunyai pijakan hukum untuk menghimbau atau lebih keras lagi melarang petani-petani yang berada di dalam wilayah kerjanya mengalihfungsikan lahan pangannya yang sangat potensial menjadi areal perkebunan.

Daftar Pustaka

- Adri F, Prayudi B. 2009. Sistem Usaha tani Terpadu Berbasis Karet di Lahan Kering. Dalam Jurnal Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian, Volume 12-1, Tahun 2009. Bogor: Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian.
- Alihamsyah T., E.E. Ananto, H. Supriadi, S. Ahyuni, E. Suhartatik, K. Nugroho, dan Sutrisna. 2000. Karakterisasi Wilayah di Scheme Pamusiran dan Rantau Rasau Wilayah Pengembangan ISDP Provinsi Jambi. Bogor: Proyek Penelitian Pengembangan Pertanian Lahan rawa Terpadu-ISDP.
- Amri. 2004. Prospek Pengembangan Kelapa Sawit di Provinsi Jambi. Laporan penelitian. Kerja Sama antara Bank Indonesia Cabang Jambi dengan Universitas Jambi. Bank Indonesia.
- Bank Indonesia Jambi. 2006. Analisis Sistem Pemasaran Bokar,” *Suatu Kajian Terhadap Upaya Peningkatan Kesejahteraan Petani Karet Melalui Pembinaan Tataniaga Bahan Olah Karet Rakyat (BOKAR) di Provinsi Jambi*”. Laporan Penelitian Tahun 2006. Bank Indonesia Jambi.

- Dinas Perkebunan Provinsi Jambi. 2004, 2005 dan 2009. Data Statistik Perkebunan Provinsi Jambi Tahun 2003, 2004, dan 2008. Jambi: Dinas Perkebunan Provinsi Jambi.
- Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jambi. 2005 dan 2009 **a**. Data Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jambi Tahun 2004 dan 2008. Jambi: Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jambi.
- 2009 **b**. Laporan Tahunan Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jambi Tahun 2008. Jambi: Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jambi.
- Kementerian Pertanian Republik Indonesia. 2009. Rancangan Rencana Strategis Kementerian Pertanian Tahun 2010–2014. Indoensia, Jakarta: Kementerian Pertanian Republik.
- Kompas, 10 Maret 2005. Kelapa Sawit di Provinsi Jambi Kurang Pupuk. Jakarta: PT Gramedia.
-, 12 Agustus 2010. Adaptasi Petani di Jambi pada Perubahan Iklim. Jakarta: Penerbit PT Gramedia.
- Matondang S, R Situmorang, dan SMH Tampubolon. 1992. Prospek Sumbangan Intensifikasi Padi di Daerah Pasang Surut dalam Usaha Mempertahankan Swasembada Beras. Dalam Risalah Pertemuan Nasional Pengembangan Pertanian Lahan Rawa Pasang Surut dan Lebak, Cisarua 3–4 Maret 1992. Bogor: Pusat Penelitian dan Pengembangan Pertanian.
- Minsyah NI. 2009. Daya Tarik Kelapa Sawit dan Hubungannya Dengan Alih Fungsi Lahan Pangan di Provinsi Jambi. Dalam Jurnal Sosio Ekonomika Bisnis Universitas Jambi, Vol 12 No 1, edisi Januari–Juni 2009. Jambi: Fakultas Pertanian Universitas Jambi.
- , 2007. Potensi dan Minimalisasi Kerugian Penggunaan Bibit Kelapa Sawit Palsu . Makalah disampaikan pada Ekspose dan Seminar Nasional Hasil Penelitian dan Pengkajian Teknologi Pertanian Mendukung PENAS XII, Sembawa 9–10 Juli 2007.
- Sitanggang D, B Prayudi, Mugyanto, NI Minsyah, A Meilin, dan Mulyatri. 2006. Analisis dan Kebijakan Pembangunan Pertanian. Laporan Hasil Kegiatan Penelitian/ Pengkajian. Jambi: Balai Pengkajian Teknologi Pertanian.
- Sugandha H dan U Kurnia. 2001. Kiat Berusaha tani Sayuran di Lahan Kering Berlereng Curam. Warta Penelitian dan Pengembangan Pertanian. Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian.